



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M ABDUL MAJID IKRAM
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 250335

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.305.000.000**

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
Rp. 3.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/109 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/180 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KARAWANG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **481.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA TIPE G Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000



4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.099.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.836.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.142.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 20.863.500.000

III. HUTANG Rp. 950.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.913.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.